BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Pada Pemilihan Umum tahun 2024 di Provinsi Jambi, Bawaslu Provinsi Jambi melakukan penanganan terhadap 4 kasus pelanggaran netralitas ASN yang melibatkan ASN melakukan pendekatan dan mendaftarkan diri pada partai politik, ikut kegiatan kampanye, atau menyalahgunakan wewenang.

- a. Bawaslu Provinsi Jambi memiliki kewenangan untuk melakukan pengawasan terhadap netralitas ASN dalam pemilihan umum, menindaklanjuti laporan dan temuan mengenai pelanggaran netralitas ASN. Mekanisme penanganan pelanggaran netralitas ASN oleh Bawaslu Provinsi Jambi menggunakan mekanisme penanganan pelanggaran yang tidak terstruktur, dimana Bawaslu Provinsi Jambi tidak melakukan sidang adjudikasi terlebih dahulu terhadap ketiga kasus pelanggaran netralitas ASN dan justru hanya melakukan kajian saja dan langsung memberikan rekomendasi terhadap ketiga kasus tersebut kepada BKN..
- b. Bentuk Pengawasan Bawaslu terhadap Pelaksanaan Keputusan Pejabat Pembina Kepegawaian, yaitu dengan cara berkoordinasi dengan KASN dan BKN terkait dengan tindak lanjut PPK, guna memastikan keputusan yang diambil telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan prinsip netralitas ASN. Dimana dari ketiga kasus pelanggaran netralitas ASN yang ditangani oleh Bawaslu Provinsi telah

dijatuhi sanksi oleh PPK sesuai dengan aturan dan ketentuan yang berlaku. Dalam hal ini Bawaslu Provinsi Jambi telah menjalankan tugas sesuai dengan kewenangan dan tupoksinya.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian mengenai pelanggaran netralitas ASN dan peran Bawaslu Provinsi Jambi, peneliti memberikan beberapa saran yang dapat dipertimbangkan:

- a. Peningkatan sosialisasi dan edukasi, Bawaslu sebagai lembaga yang berwenang dalam melakukan pengawasan dan penanganan terhadap netralitas ASN seharusnya memberikan pelatihan yang tepat terhadap anggotanya dalam melaksanakan mekanisme penanganan kasus yang terstruktur dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku sehingga dalam pelaksanaan penanganan kasusnya tidak ada pihak-pihak yang dirugikan.
- b. Penguatan mekanisme pengawasan, diperlukan penguatan mekanisme pengawasan dan penegakan hukum terhadap pelanggaran netralitas ASN. Hal ini dapat dilakukan dengan meningkatkan kerjasama antara Bawaslu, KASN, dan instansi pemerintah terkait lainnya untuk memastikan adanya tindak lanjut yang tegas terhadap pelanggaran yang teridentifikasi.

Dengan menerapkan saran-saran tersebut, diharapkan pelanggaran netralitas ASN dapat diminimalisir, sehingga proses pemilihan umum kedepannya dapat berlangsung secara adil dan demokratis.